

Vol. 11 No. 2 (2023), Halaman 101-108



KONFLIK PERDAGANGAN MINYAK SAWIT INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN UNI EROPA (EU)

Justra Yijreal Situmorang^{1*}, Silviani², Khoirida Rahma³, Oot Hotimah⁴

¹²³⁴⁵Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: justmrng10@gmail.com^{1*}, silvianibatriska@gmail.com²,
khoi24rhm@gmail.com³, oothotimah@unj.ac.id⁴

Website Jurnal: <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/social-science>

 Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI:

(Diterima: 31-10-2023; Direvisi: 07-12-2023; Disetujui: 30-12-2023)

ABSTRACT

This research explores the impact of the Indonesian and Malaysian palm oil trade conflict on the European Union (EU), highlighting the EU's role in the conflict. research method using literature study. The study results show that overcoming conflict requires sustainable cooperation, transparency, and prioritizing human rights and the environment. The future of the palm oil industry must include sustainability principles, sustainable certification and economic diversification in affected regions.

Keywords: Conflict, European Union, Palm Oil.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi dampak konflik perdagangan minyak sawit Indonesia dan Malaysia terhadap Uni Eropa (UE), dengan menyoroti peran UE dalam konflik tersebut. metode penelitian dengan studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa mengatasi konflik memerlukan kerja sama yang berkelanjutan, transparansi, dan mengutamakan hak asasi manusia dan lingkungan. Masa depan industri kelapa sawit harus mencakup prinsip-prinsip keberlanjutan, sertifikasi berkelanjutan, dan diversifikasi ekonomi di wilayah yang terkena dampak.

Kata Kunci: Konflik, Minyak sawit, Uni Eropa (UE)

PENDAHULUAN

Minyak sawit merupakan bahan mentah yang dapat ditemukan dimana-mana. Tanaman ini merupakan bahan utama dalam banyak olahan makanan yang sering kita konsumsi. Minyak sawit merupakan minyak yang paling umum digunakan dalam kosmetik dan produk pembersih rumah tangga. Penggunaannya meningkat secara signifikan di seluruh dunia.

Indonesia merupakan eksportir minyak sawit terbesar di pasar internasional karena tingginya permintaan global terhadap minyak sawit. Permintaan minyak sawit yang besar berasal dari Uni Eropa yang menggunakan minyak nabati sebagai bahan baku utama

produksi energi terbarukan yang dikenal dengan biofuel ([Fargione et al., 2008](#)). Fenomena ini memberikan banyak peluang bagi banyak negara produsen kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mendorong perluasan sektor ini di wilayah perkebunan kelapa sawit. Menurut Badan Pusat Statistik Finlandia (BPS), Indonesia akan mengekspor minyak sawit sebesar 25,01 juta ton pada tahun 2022. Nilai ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2022 sebesar \$27,76 miliar. Padahal, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), negara yang menjadi tujuan pemasaran produsen kelapa sawit secara internasional adalah Indonesia dan Malaysia.

Bersama-sama, kedua negara ini menguasai 85-90% pasar minyak sawit dunia.

Potensi yang dimiliki kedua negara ini membuat keduanya bekerja sama membentuk Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit atau yang disebut *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) ([Bayu et al., 2019](#); [Colchester & Chao, 2015](#); [Pratiwi, 2019](#)). CPOPC didirikan pada tanggal 21 November 2015 oleh Menteri Koordinator Bidang Kelautan dan Sumber Daya Alam Dr. Rizal Ramli (perwakilan Indonesia) dan Menteri Kelautan dan Sumber Daya Alam Dr. Datuk Amar Douglas Uggah Embas (Perwakilan Malaysia) dari Industri Perkebunan dan Komoditas. Kemudian pada tanggal 4 Mei 2016, Indonesia meratifikasi Piagam Pembentukan Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2016 ([Suryapratama, 2018](#)).

Namun Bank Dunia mempunyai banyak permasalahan dalam perdagangan minyak sawit internasional, yang paling menarik adalah perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia baru-baru ini. Semuanya dimulai pada 17 Januari 2018, ketika Parlemen Eropa melakukan pemungutan suara mengenai penggunaan minyak sawit dalam produk biodiesel. Diputuskan untuk meningkatkan efisiensi energi sebesar 35 persen pada tahun 2030. Dalam sebuah survei, mayoritas Parlemen Eropa menyetujui rencana pelarangan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku produksi biodiesel pada tahun 2021.

Sebelumnya, pada tanggal 23 April 2009, Uni Eropa menetapkan kebijakan komprehensif produksi dan promosi energi dari sumber terbarukan di Uni Eropa, yaitu *Renewable Energy Directive* (RED). Pengenalan RED di Uni Eropa adalah yang pertama. Ini merupakan langkah penting bagi Uni Eropa untuk mengurangi emisi karbon dioksida global sebagai bagian dari komitmennya terhadap Protokol Kyoto. Dengan RED, negara-negara Uni Eropa harus memastikan bahwa setidaknya 10% bahan bakar transportasi ramah lingkungan yang mereka produksi terbuat dari bahan bakar transportasi ramah lingkungan dari sumber terbarukan ([Lumbangaol, 2019](#)). Uni Eropa juga melakukan hal ini untuk memastikan produksi transportasi yang berkelanjutan dan ekologis. Semuanya dimulai pada 17 Januari 2018, ketika Parlemen Eropa melakukan pemungutan suara mengenai

penggunaan minyak sawit dalam biodiesel. beberapa produk. Diputuskan untuk meningkatkan efisiensi energi sebesar 35 persen pada tahun 2030. Dalam sebuah survei, mayoritas Parlemen Eropa menyetujui rencana pelarangan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku produksi biodiesel pada tahun 2021.

Selain untuk melindungi lingkungan dan mengurangi emisi global, tindakan Uni Eropa dalam menciptakan RED dianggap sebagai jenis penghalang baru yang diciptakan Uni Eropa untuk melindungi produk biofuel negara lain, karena Uni Eropa sejauh ini merupakan negara yang paling dilindungi. yang terpenting. negara di pasar biodiesel. Produsen Uni Eropa terus dianggap sebagai pionir dalam penciptaan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa Uni Eropa merupakan konsumen minyak dan gas terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Ketentuan tambahan yang didelegasikan dalam Petunjuk Energi Terbarukan II (RED II) UE menyatakan bahwa penggunaan minyak sawit sebagai biofuel di Uni Eropa harus dihapuskan pada tahun 2030 dan penggunaan minyak sawit harus dikurangi. dimulai pada tahun 2024 ([Rahayu & Sugianto, 2020](#)).

Pelarangan minyak sawit karena dianggap sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan, sehingga Indonesia sepakat untuk menghentikan impor dan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa, karena kebijakan ini membatasi akses pasar. minyak sawit dan biofuel yang berasal dari minyak sawit, yang berdampak negatif terhadap ekspor minyak sawit dari Indonesia. Produk minyak bumi di pasar Uni Eropa Sebagai “penanggulangan”, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberlakukan larangan ekspor bijih atau bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk melestarikan cadangan nikel. Memperhatikan keberlangsungan persediaan bahan baku smelter yang ada. Selain kebijakan lingkungan hidup seperti pelarangan ekspor nikel dan minyak sawit karena dianggap berbahaya bagi lingkungan, Uni Eropa juga menggugat Indonesia ke WTO karena melarang ekspor bijih nikel.

Menurut Uni Eropa, kerusakan lingkungan akibat pertambangan tidak sebesar kerusakan akibat kelapa sawit. Penentangan dan tuntutan Uni Eropa terhadap Indonesia bermula dari

fakta bahwa meskipun Indonesia mengalami kemajuan, namun Uni Eropa masih sangat bergantung pada ekspor bijih nikel Indonesia, karena bijih nikel digunakan dalam industri teknologi dan otomotif. Ketegangan perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa tidak memberikan dampak yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode tinjauan pustaka dan melakukan beberapa kegiatan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai topik yang sedang dibahas, seperti: membaca, mencatat, dan mengolah data

Hal ini disebabkan terbatasnya waktu dan ruang yang tersedia untuk melakukan penelitian. Pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan dan pemanfaatan situs internet (*website*) ([Harmat Tarigan & Budi Saputro, 2022](#)). Penelitian kepustakaan yang dilakukan terdiri dari membaca, memetakan dan mengumpulkan literatur dan bahan bacaan yang sesuai dengan berbagai topik, menyaringnya dan mengungkapkannya dalam kerangka teori. Dalam hal ini, penulis membaca buku dan majalah, meneliti, dan menulis berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

Teknik ini digunakan untuk memeriksa fakta dan membandingkan perbedaan atau persamaan antara teori dan praktik yang diteliti penulis dalam kaitannya dengan topik yang dibicarakan. Mengakses halaman internet (*website*) merupakan salah satu metode yang dipilih peneliti untuk melengkapi informasi yang ada. Cara ini digunakan saat menjelajahi *website* dan halaman yang menyediakan berbagai data dan informasi terkait topik yang sedang Anda pelajari. Kajian ini berdasarkan atau referensi pada halaman penelitian konflik Indonesia-Malaysia-Uni Eropa (UE) dan beberapa halaman lainnya.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami mengumpulkan data terkait perdagangan bilateral antara Thailand dan Tiongkok selama lima tahun terakhir. Data perdagangan mencakup ekspor dan impor barang serta penanaman modal asing langsung dari Tiongkok ke Thailand. Data dianalisis menggunakan metode statistik dan perangkat lunak statistik.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai perdagangan bilateral antara Thailand dan Tiongkok terus meningkat selama periode penelitian. Tahun lalu, nilai transaksi mencapai puncaknya sebesar dollar miliar. Investasi asing langsung dari Tiongkok ke Thailand juga meningkat secara signifikan.

Perdagangan bilateral antara Thailand dan Tiongkok terus berkembang, mencerminkan kerja sama ekonomi yang kuat. Investasi asing langsung dari Tiongkok ke Thailand telah memberikan dorongan besar bagi sektor perekonomian Thailand. Meskipun pertumbuhan ekonomi pesat, sengketa perbatasan bersejarah antara kedua negara masih menjadi masalah yang belum terselesaikan sepenuhnya.

Penelitian ini ditempatkan dalam konteks kerja sama ekonomi global dan regional. Semakin eratnya hubungan ekonomi antara Thailand dan Tiongkok mencerminkan berlanjutnya dinamika perdagangan di Asia Tenggara yang menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi antara Thailand dan Tiongkok memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Thailand. Investasi asing langsung dari Tiongkok telah membantu banyak sektor perekonomian Thailand dan menciptakan lapangan kerja. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam sengketa perbatasan yang memerlukan penyelesaian damai.

Penelitian sebelumnya telah menekankan pentingnya kerja sama ekonomi antara Thailand dan Tiongkok. Hasil kami konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan dampak positif dari kerja sama ini, dengan fokus pada aspek ekonomi dari kerja sama antara Thailand dan Tiongkok. Kami juga tidak menganalisis perubahan politik atau aspek budaya yang lebih dalam.

Hasil penelitian ini memiliki arti penting secara praktis, menekankan pentingnya kerja sama ekonomi berkelanjutan dan penyelesaian sengketa perbatasan secara damai. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak kerja sama ekonomi antara Thailand dan Tiongkok terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Meski terdapat tantangan yang harus diatasi, kerja sama ini berpotensi untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kawasan.

PEMBAHASAN

Uni Eropa mengeluarkan Petunjuk Energi Terbarukan pada tahun 2008

Uni Eropa (UE) bertujuan untuk keberlanjutan, karena Uni Eropa (UE) dianggap sebagai bagian dari kelompok negara yang lebih peduli terhadap masalah lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan ini, Uni Eropa telah mengembangkan kebijakan khusus mengenai pembangunan berkelanjutan.

Strategi pembangunan berkelanjutan juga lahir karena didasari oleh ketergantungan Uni Eropa terhadap sumber energi fosil. Tujuan Uni Eropa adalah mengganti ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan biofuel. Biofuel sendiri merupakan cairan yang diperoleh dari bahan tanaman (tumbuhan). Uni Eropa menganggap biofuel sebagai alternatif ideal pengganti bahan bakar fosil karena lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil.

Tujuan Uni Eropa adalah mengganti ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan biofuel. Biofuel sendiri merupakan cairan yang diperoleh dari bahan tanaman (tumbuhan). Uni Eropa menganggap biofuel sebagai alternatif ideal pengganti bahan bakar fosil karena lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Setelah transisi ke biofuel, Uni Eropa juga memberikan instruksi lebih lanjut mengenai hal ini.

Uni Eropa mengeluarkan Petunjuk Energi Terbarukan II pada tahun 2018

Pada tanggal 14 Juni 2018, Komisi Eropa kembali menetapkan target wajib penggunaan energi terbarukan, yang secara khusus mewajibkan setiap negara anggota untuk mencapai target penggunaan energi terbarukan minimal 32 persen. Kemudian, pada tahun 2019, target baru tersebut disetujui oleh Parlemen Eropa, Dewan Eropa dan negara-negara anggota dan dituangkan dalam kebijakan baru yang dikenal sebagai Parlemen Eropa RED II (*Renewable Energy Directive II*).

Pada bulan Januari 2024, Komisi Eropa akan memperkenalkan proses yang bertujuan untuk secara bertahap mengurangi jumlah biofuel tertentu dalam produksi energi terbarukan di kawasan Eropa. Bersamaan dengan kebijakan ini, Komisi Eropa akan menerapkan peraturan pelaksanaan (desentralisasi) pada 13 Maret 2019 atas permintaan Parlemen Eropa dan Dewan Eropa. Hingga saat ini, Uni Eropa telah memberlakukan larangan impor minyak sawit

dan turunannya mulai 16 Mei 2023, jika terbukti minyak tersebut dihasilkan dari deforestasi.

Isu Lingkungan yang Ditimbulkan Akibat Konflik Perdagangan Minyak Sawit

Konflik perdagangan Indonesia dan Malaysia dengan Uni Eropa telah menciptakan sejumlah permasalahan lingkungan yang memerlukan perhatian: penggundulan hutan, emisi gas rumah kaca, kerusakan lahan basah, polusi air, ancaman terhadap masyarakat adat, pengelolaan limbah dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hutan kelapa sawit merupakan salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia dan Malaysia. Untuk memenuhi permintaan minyak sawit Uni Eropa, perkebunan kelapa sawit telah menginvasi hutan-hutan yang berharga. Hal ini menyebabkan hilangnya habitat spesies endemik dan mengancam keanekaragaman hayati. Gas rumah kaca juga menjadi topik hangat yang disebabkan oleh bisnis kelapa sawit. Deforestasi untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit dan pengelolaannya yang tidak berkelanjutan menyebabkan emisi karbon dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer. Ini berkontribusi terhadap perubahan iklim global.

Permasalahan ketiga adalah rusaknya lahan basah, dimana dibukanya perkebunan kelapa sawit seringkali mengakibatkan mengeringnya lahan basah yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami dan habitat berbagai spesies endemik. Hal ini juga dapat menyebabkan kebakaran, yang biasa terjadi di daerah ini. Selain itu, penggunaan pestisida dan pupuk kimia di perkebunan kelapa sawit menyebabkan pencemaran air, mencemari sumber air seperti sungai dan danau, serta berdampak negatif terhadap lingkungan perairan dan spesies ikan. Konflik perdagangan minyak juga berdampak pada masyarakat adat, yang seringkali kehilangan hak atas tanah ketika hutan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, pengolahan kelapa sawit juga menghasilkan limbah cair yang mengandung banyak bahan kimia berbahaya. Jika sampah tidak dibuang dengan benar, maka dapat mencemari air tanah dan lingkungan sekitar.

Penerapan kebijakan yang lebih ketat terhadap impor minyak sawit berkelanjutan oleh Uni Eropa dapat mendorong produsen minyak sawit di Indonesia dan Malaysia untuk

mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan.

Namun juga harus menemukan solusi yang adil bagi produsen dan masyarakat yang bergantung pada industri kelapa sawit. Hal ini merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan kerja sama semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang menyeimbangkan kepentingan komersial dan lingkungan hidup.

Isu Sosial yang Ditimbulkan Akibat Konflik Perdagangan Minyak Sawit

Permasalahan sosial terkait konflik Konflik perdagangan kelapa sawit antara Indonesia, Malaysia dan Uni Eropa lebih fokus pada hak asasi manusia dan mencakup beberapa aspek penting seperti hak masyarakat adat dan pekerja atas tanah. Hal ini berdampak signifikan terhadap hubungan dagang kedua negara dengan Uni Eropa. Industri kelapa sawit seringkali mengakibatkan hilangnya lahan bagi masyarakat adat yang tinggal di wilayah dimana perkebunan kelapa sawit telah didirikan, sehingga mengakibatkan hilangnya akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlanjutan hidup mereka.

Selain itu, terdapat permasalahan sosial lainnya seperti rendahnya upah pekerja. Hak-hak pekerja seringkali dilanggar di perkebunan kelapa sawit, seperti upah rendah, lembur, dan kondisi kerja yang berbahaya. Selain itu, industri kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia banyak mempekerjakan pekerja migran yang seringkali rentan terhadap eksploitasi dan penindasan.

Oleh karena itu dikatakan masyarakat kita harus cerdas dalam menyikapi permasalahan sosial. Masyarakat perlu meningkatkan pengetahuannya mengenai hak asasi manusia agar masyarakat mana pun yang merasa dirugikan dalam bidang ini dapat mengambil tindakan. Selain itu, masyarakat harus melakukan dialog terbuka dengan pemangku kepentingan seperti pemilik industri, pemerintah, serikat pekerja dan masyarakat adat untuk mencari segala solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada.

Dampak Konflik Perdagangan Minyak Sawit Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan dalam mengelola perubahan iklim

sejalan dengan komitmen Perjanjian Paris mereka. Konflik Indonesia-Malaysia terkait kelapa sawit masih abu-abu. Minyak sawit sendiri merupakan salah satu produk ekspor terbesar Indonesia dan Malaysia yang terutama ditujukan ke pasar Uni Eropa. Namun komitmen Uni Eropa terhadap Perjanjian Paris mendorong Uni Eropa untuk lebih fokus pada energi baru dan terbarukan serta menerapkan larangan impor minyak sawit oleh Komisi Eropa, terutama dengan menerbitkan rancangan peraturan Uni Eropa. Petunjuk Energi Terbarukan. (RED II) dan melindungi produksi minyak bunga matahari dan minyak lobak. Minyak sawit India terutama diekspor ke pasar India, Uni Eropa, Singapura, Malaysia dan Kenya. Pada tahun 2014, ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa menyumbang 33,85%, menjadi eksportir terbesar kedua setelah India (49,96%) ([Khairunisa & Novianti, 2017](#))

Hal ini menunjukkan bahwa UE merupakan pasar yang potensial, meskipun pasar UE masih lebih kecil dibandingkan India. Untuk menstabilkan bahkan meningkatkan ekspor ke pasar Uni Eropa, diperlukan kebijakan yang tepat di pasar minyak sawit mentah Uni Eropa. Salah satu dampak negatif dari produksi minyak sawit (selain dampak kesehatan masyarakat karena kandungan lemak jenuhnya yang tinggi) adalah bahwa bisnis minyak sawit merupakan penyebab utama deforestasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia. Setelah Tiongkok dan Amerika Serikat, produsen gas rumah kaca terbesar meluncurkan beberapa kampanye hitam di Eropa terhadap minyak sawit mentah Indonesia, dengan menyatakan bahwa minyak sawit mentah Indonesia tidak ramah lingkungan.

Usaha Pemerintah Indonesia dalam Konflik Perdagangan Minyak Sawit

Dalam menghadapi permasalahan yang timbul ketika Uni Eropa membatasi penggunaan minyak kelapa sawit, Pemerintah Indonesia mengajukan klaim untuk menolak tuduhan tersebut. Beberapa klaim yang disampaikan mencakup penolakan terhadap kampanye negatif yang dilancarkan oleh Uni Eropa. Pemerintah Indonesia menyoroti bahwa gas karbon dioksida (CO²) merupakan penyebab utama pemanasan global di seluruh dunia, menyumbang sebanyak 92% dari total gas rumah kaca pada tahun 2011. Sektor

terbesar yang menghasilkan emisi CO₂ berasal dari penggunaan energi dan bahan bakar fosil secara global, dengan kontribusi sebanyak 56% dari total emisi tersebut.

Pemerintah juga menekankan bahwa Cina merupakan negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia, menyebabkan banyak emisi dari bahan bakar fosil. Emisi gas rumah kaca terbesar dari sektor pertanian berasal dari negara-negara seperti Cina, Brazil, India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Lebih lanjut, pemerintah menyoroti bahwa penebangan pohon di hutan terjadi di negara yang memiliki hutan di luar daerah tropis. Sementara negara-negara dengan hutan tropis cenderung melakukan upaya penanaman kembali sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan hutan yang telah ditebang.

Indonesia harus meyakinkan dunia dengan bukti yang jelas dan kredibel untuk melindungi produksi minyak sawit yang saat ini sedang menghadapi kampanye negatif. Jawaban tegas terhadap klaim bahwa minyak sawit menimbulkan efek rumah kaca menjelaskan bahwa sebenarnya emisi per kapita Indonesia sebesar 1,8 ton sedangkan Uni Eropa sebesar 1,8 ton, 7,5 ton. Hal ini secara efektif dapat menunjukkan bahwa emisi yang dihasilkan di Eropa lebih besar dibandingkan dengan emisi yang dihasilkan di Indonesia, negara yang awalnya disalahkan karena berkontribusi terhadap emisi skala besar akibat penggunaan minyak sawit (Sally, 2016).

Indonesia dapat mencari lokasi yang sesuai untuk menemukan sistem yang efektif dalam mengatasi permasalahan ini. Selama ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan proteksionisme dengan mengevaluasi bukti-bukti dan memberikan rekomendasi kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Jika negara yang dituduh tidak mematuhi rekomendasi tersebut, WTO dapat memberikan izin kepada negara yang merasa dirugikan untuk menerapkan pembatasan perdagangan terhadap negara yang melanggar. Sejak lama, isu kesehatan telah menjadi peluang bisnis yang menguntungkan.

AS dan Kanada juga menghadapi permasalahan serupa terkait ekspor daging dan kebijakan COOL (*Country of Origin Labeling*) di Kanada, seperti yang dialami oleh AS. Sebagai tanggapan, dibentuklah mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan isu

ini. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia dapat mengambil contoh solusi yang telah diterapkan oleh negara-negara di Eropa yang saat ini membatasi penggunaan minyak kelapa sawit. Langkah ini dapat memberikan dampak positif secara signifikan pada perekonomian negara dan menjadi prioritas pemerintah untuk segera mengambil tindakan demi kepentingan ekonomi dan pertumbuhan nasional.

Usaha Pemerintah Malaysia dalam konflik perdagangan Minyak Sawit

Upaya pemerintah Malaysia tidak jauh berbeda dengan upaya Indonesia. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Malaysia Mustapa Mohamed meminta negara-negara produsen minyak sawit, termasuk Indonesia, melaporkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WHO). Malaysia telah mengajukan keluhan ke WTO, dengan alasan bahwa larangan UE melanggar aturan perdagangan. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah minyak sawit memasuki pasar Uni Eropa.

Malaysia juga mendesak negara-negara produsen minyak sawit lainnya untuk bekerja sama dan memajukan kepentingannya di komite WTO. Malaysia mengkritik perusahaan swasta Eropa karena bersikap adil dan tidak terpengaruh oleh politik atau pandangan negatif Parlemen Eropa terhadap minyak sawit.

KESIMPULAN

Solusi dan prospek masa depan dalam menghadapi konflik perdagangan minyak sawit antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa (EU) adalah dengan menciptakan kerjasama yang berkelanjutan, transparan, dan memprioritaskan hak asasi manusia dan lingkungan. Kedua negara perlu bersatu untuk mengatasi masalah internal terkait dengan hak tanah masyarakat adat dan kondisi kerja pekerja buruh. Ini dapat dicapai melalui pemantauan independen, penegakan hukum yang ketat, dan reformasi peraturan di tingkat nasional. Selain itu, kerja sama regional di Asia Tenggara dapat memperkuat posisi Indonesia dan Malaysia dalam perundingan dengan Uni Eropa, mempromosikan praktik berkelanjutan dalam industri minyak sawit, dan mengurangi dampak negatifnya terhadap hak asasi manusia dan lingkungan.

Masa depan industri minyak sawit harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, termasuk sertifikasi keberlanjutan dan diversifikasi ekonomi di wilayah-wilayah yang terpengaruh. Dengan pendekatan ini, Indonesia dan Malaysia dapat mempertahankan posisi mereka sebagai produsen utama minyak sawit sambil menjaga hubungan dagang yang positif dengan Uni Eropa dan memenuhi tuntutan pasar global yang semakin peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan.

SARAN

Sengketa mengenai minyak kelapa sawit antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan isu lingkungan, perdagangan antarnegara, dan keputusan pemerintah. Potensi solusi dan peluang untuk masa depan bisa bervariasi, membantu mengurangi tekanan terhadap hutan hujan dan mendukung pengembangan produk yang lebih berkelanjutan.

Perbaikan pada sertifikasi RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dapat berperan dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh produksi minyak kelapa sawit. Langkah ini juga dapat membuka peluang lebih besar untuk mengakses pasar Uni Eropa. Diplomasi yang berkelanjutan antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa perlu terus dilakukan, mengusung prinsip perdagangan yang adil dan berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi terkini dalam produksi minyak kelapa sawit dapat memberikan dampak positif pada lingkungan. Misalnya, penerapan teknik pertanian dan teknologi terkini dapat terus ditingkatkan untuk mengawasi pengelolaan hutan secara lebih baik. Penyebarluasan pengetahuan tentang dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan produksi minyak kelapa sawit kepada berbagai pihak dapat mendorong produsen dan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih berkelanjutan.

Masa depan tergantung pada tindakan nyata yang diambil oleh semua pihak yang terlibat. Langkah-langkah untuk melestarikan lingkungan, mengurangi dampak negatif pada masyarakat, dan mendorong perdagangan yang berkelanjutan menjadi krusial dalam

penyelesaian konflik ini dan pencapaian solusi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu, H. P., Ningrum, S., & Alexandri, M. B. 2019. Upaya Indonesia dalam Melindungi Industri Minyak Kelapa Sawit di Pasar Internasional. *Responsive*, 2(4), 132–139.
- Colchester, M., & Chao, S. 2015. Ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara: Sebuah tinjauan. *Colchester, M., Chao, S., Dallinger, J., Sokhannaro, HEP, Dan, VT, Villanueva, J., Eds.*
- Fargione, J., Hill, J., Tilman, D., Polasky, S., & Hawthorne, P. 2008. Land Clearing and the Biofuel Carbon Debt. *Science*, 319(5867), 1235–1238.
- Harmat Tarigan, D., & Budi Saputro, P. 2022. Konflik Indonesia Dengan Uni Eropa (Ue) Dan Dampaknya Terhadap Posisi Keanggotaan Indonesia Di Paris Agreement. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 595–606. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.67>
- Khairunisa, G. R., & Novianti, T. 2017. Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 5(2), 125–136.
- Lumbangaol, J. K. 2019. *Implementasi Kebijakan Renewable Energy Directive Uni Eropa di Jerman Melalui Program Energiewende Tahun 2014-2016*. Program Studi Hubungan Internasional FISKOM-UKSW.
- Pratiwi, B. R. 2019. *Strategi Indonesia Dan Malaysia Dalam Menghadapi Hambatan Non-Tariff Barrier Minyak Sawit Yang Dilakukan Uni Eropa*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahayu, S. W., & Sugianto, F. 2020. Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian

Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 373034.

Sally, N. U. 2016. Sengketa Minyak Sawit Antara Indonesia dan Uni Eropa. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*,

1(01).

Suryapratama, D. Y. 2018. *Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit dan Kepentingan Nasional Indonesia*. Universitas Sumatera Utara.